

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM
MENGENDALIKAN KASUS PENYAKIT MALARIA
(Studi Kasus Kecamatan Gunung Kijang)**

Oleh

Helen Permata Sari

NIM. 2105010078

ABSTRAK

Malaria salah satu penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tropis seperti Kabupaten Bintan. Kecamatan Gunung Kijang merupakan kasus malaria terbanyak Di Kabupaten Bintan yakni 23 kasus kemudian pada tahun 2023 Terjadinya penurunan yang signifikan yakni menjadi nol Kasus. pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam upaya pengendalian malaria. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan utama, yang terdiri dari pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kader Malaria dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai regulator, pemerintah belum membuat kebijakan atau regulasi terkait pengendalian malaria tetapi Dinas Kesehatan sedang membuat kebijakan dan peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan malaria, serta memastikan ketersediaan anggaran melalui program-program kesehatan. Dalam peran fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, seperti kelambu, alat rapid test, serta pelatihan bagi petugas dan kader. Pemerintah juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan media komunikasi. Sedangkan sebagai dinamisator, pemerintah menjalin kerja sama lintas sektor serta mengaktifkan peran serta masyarakat melalui kader dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan dalam pencegahan malaria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga peran pemerintah telah berjalan namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan program di lapangan. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan monitoring kebijakan, pelatihan berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program pengendalian malaria.

Kata Kunci: Malaria, Pengendalian Penyakit, Peran Pemerintah.

**THE ROLE OF THE BINTAN REGENCY GOVERNMENT IN
CONTROLLING MALARIA CASES
(Case Study of Gunung Kijang District)**

By

Helen Permata Sari

NIM. 2105010078

ABSTRACT

Malaria is one of the infectious diseases that remains a public health problem, particularly in tropical areas such as Bintan Regency. Gunung Kijang District recorded the highest number of malaria cases in Bintan, with 23 cases, but in 2023, a significant decline occurred, reaching zero cases. This study aims to analyze the role of the government as a regulator, facilitator, and dynamizer in malaria control efforts. The research method used is descriptive qualitative. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, consisting of representatives from the Health Office, the Community Health Center (Puskesmas), malaria cadres, and the community. The results show that as a regulator, the government has not yet established formal policies or regulations specifically for malaria control, although the Health Office is in the process of developing local policies and regulations related to malaria prevention and management, and ensuring budget availability through health programs. As a facilitator, the government provides health infrastructure and facilities, such as mosquito nets, rapid test kits, and training for health workers and cadres. The government also actively disseminates education to the community through counseling and communication media. As a dynamizer, the government promotes cross-sectoral collaboration and activates community participation through cadres and local organizations to increase awareness and involvement in malaria prevention. This study concludes that the three roles of the government have been implemented but still require strengthening, particularly in cross-sector coordination and program sustainability. Recommendations are directed toward improving policy monitoring, continuous training, and active community involvement in all stages of malaria control programs.

Keywords: *Malaria, Disease Control, Role of Government.*